

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Yektiningsih, 2018). Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Suhartono, 2022). Pembangunan manusia merupakan proses peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memberdayakan potensi diri, mencukupi keperluan mendasar, dan memperluas pilihan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Pembangunan manusia penting dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, baik dalam aspek ekonomi maupun aspek sosial seperti tingkat pendidikan dan Kesehatan (Bustamam *et. al*, 2021). Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas pembangunan manusia (Azhari *et. al*, 2025). Kesejahteraan adalah tolak ukur yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat telah mencapai kondisi yang makmur. Kesejahteraan masyarakat mencerminkan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan, serta adanya akses yang memadai terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja (Permatasari & Kristiyanti, 2023). Kesejahteraan penduduk menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong perbaikan kualitas hidup dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah, karena mencerminkan

dampak nyata pembangunan terhadap kehidupan masyarakat secara luas (Sari *et. al*, 2026).

Pembangunan ekonomi menjadi bagian penting dari pembangunan nasional Negara Indonesia. Tujuan dari pembangunan ekonomi ialah peningkatan taraf hidup masyarakat yang diusahakan agar hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat (Darman & Rahayu, 2023). Tujuan pembangunan manusia adalah menciptakan kondisi individu cerdas, sehat dan produktif sehingga memiliki peluang untuk mengembangkan potensi diri (Wardhana *et. al*, 2025). Secara konseptual, pembangunan manusia dapat dipahami sebagai rangkaian upaya strategis yang bertujuan memperluas pilihan dan kesempatan masyarakat agar mampu mencapai taraf hidup yang layak. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat sekaligus tujuan akhir dari proses pembangunan. Perluasan peluang tersebut diwujudkan melalui penguatan kapasitas dasar individu, peningkatan kemampuan daya beli, serta penyediaan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang, berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan (Apriska *et. al*, 2024).

Kesejahteraan dapat dipahami sebagai indikator yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat telah mencapai taraf kehidupan yang layak dan berkembang (Situngkir & Sembiring, 2023). Kehidupan yang sejahtera merupakan kehidupan yang diinginkan oleh semua manusia. Akan tetapi, tidak semua orang dapat merasakan hidup secara sejahtera (Ningrum *et. al*, 2020). Tingkat kesejahteraan umumnya tercermin dari berbagai aspek mendasar, seperti kondisi kesehatan, stabilitas ekonomi, rasa bahagia, serta mutu kehidupan yang dirasakan oleh

masyarakat. Dalam persepsi umum, keluarga yang tergolong sejahtera memiliki kemampuan untuk menyediakan akses pendidikan setinggi mungkin bagi setiap anggotanya. Pendidikan yang lebih tinggi diyakini mampu meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang memadai, sehingga berdampak positif terhadap taraf hidup keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi tujuan utama dalam kehidupan berkeluarga. Konsep ini merujuk pada kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan pendukung lainnya agar dapat menjalani kehidupan yang layak, sehat, serta produktif secara berkelanjutan (Mulia & Saputra, 2020).

Kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara inklusif melalui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengangkat manusia dari keterbelakangan menuju Sejahtera (Si'lang *et. al*, 2019). Dalam kajian ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur hanya berdasarkan aspek ekonomi semata, melainkan harus dilihat secara multidimensional. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam mendorong produktivitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, IPM dipandang sebagai indikator yang relevan dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. (Situngkir & Sembiring, 2023)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi fisik seperti kesehatan

dan tingkat kesejahteraan, maupun dari sisi nonfisik seperti kemampuan intelektual dan capaian pendidikan. Dalam konsep ini, manusia ditempatkan sebagai fokus utama dalam setiap kebijakan dan proses pembangunan (Wijaya *et. al*, 2025). United Nations Development Programme (UNDP) mengembangkan IPM sebagai instrumen untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau daerah berdasarkan perspektif pembangunan manusia. Dalam pengukurannya, IPM disusun berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu angka harapan hidup (AHH) yang merepresentasikan derajat kesehatan, indikator pendidikan yang meliputi angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS), serta kemampuan daya beli masyarakat yang mencerminkan standar hidup layak. (Laode *et. al*, 2020)

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) (1995), konsep pembangunan manusia bertumpu pada empat pilar utama. Pertama, produktivitas, yaitu masyarakat perlu didorong agar mampu meningkatkan kapasitas dan kinerjanya sehingga dapat terlibat secara optimal dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam memperoleh pendapatan dan pekerjaan yang layak. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia. Kedua, ekuitas (keadilan), yang menekankan pentingnya akses yang setara terhadap berbagai peluang. Hambatan, baik dalam bidang ekonomi maupun politik, harus dihilangkan agar setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi serta merasakan manfaat pembangunan. Ketiga, keberlanjutan, yakni jaminan bahwa kesempatan yang tersedia saat ini tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, tetapi juga tetap terpelihara bagi generasi mendatang. Untuk itu, berbagai bentuk modal baik fisik, sumber daya manusia, maupun lingkungan perlu dijaga dan dikembangkan secara

berkesinambungan. Keempat, pemberdayaan, yang berarti pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar sebagai objek. Partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka menjadi kunci, sehingga peningkatan kapasitas, kreativitas, dan produktivitas manusia dapat mendorong mereka menjadi penggerak utama pertumbuhan. (Yektiningsih, 2018)

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui umur harapan hidup, dimensi pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran riil per kapita. Ketiga dimensi tersebut merupakan unsur utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat karena kesejahteraan tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Penggunaan IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat juga didukung oleh penelitian (Mulia & Saputra, 2020) dalam penelitian berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan variabel independen berupa PDRB per kapita dan jumlah penduduk miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena mencerminkan kualitas hidup melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Penggunaan IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat dinilai lebih tepat dibandingkan hanya menggunakan pendapatan masyarakat saja. Hal ini karena masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi belum tentu sejahtera apabila akses terhadap pendidikan dan kesehatan masih rendah. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara layak, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu, IPM dianggap sebagai indikator yang lebih representatif dalam mengukur kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban.

Pada tingkat nasional, Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir setelah mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan angka kemiskinan. Data statistik nasional menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih berada pada kisaran satu digit yang cukup besar secara absolut. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat menjadi semakin relevan untuk dilakukan. Selain itu, ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia masih menjadi isu yang krusial. Beberapa daerah menunjukkan capaian IPM yang tinggi dan stabil, sementara daerah lain masih tertinggal dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa distribusi hasil pembangunan belum merata secara geografis. Studi sebelumnya menekankan bahwa disparitas regional dapat memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sari *et. al*, 2026). Dengan demikian,

kajian berbasis wilayah menjadi penting untuk memahami dinamika kesejahteraan secara lebih spesifik.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu kontributor utama perekonomian nasional dengan struktur ekonomi yang kuat di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cenderung stabil dan menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, capaian kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kabupaten Tuban sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor industri, pertanian, dan sumber daya alam lainnya. Potensi ini seharusnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Kabupaten Tuban adalah salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di bagian barat laut provinsi tersebut. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Bojonegoro di sebelah selatan, serta Kabupaten Lamongan di bagian timur. Adapun letak Kabupaten Tuban berada di jalur pantura diharapkan dapat mempermudah lalu lintas perdagangan, sehingga perekonomian masyarakat maupun daerah dapat sejahtera. Pertumbuhan ekonomi yang kuat, diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan sumber daya, sehingga dapat mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Akan tetapi, seringkali terjadi ketidakselarasan antara pertumbuhan PDRB dan peningkatan IPM. Untuk mengetahui perkembangan indeks pembangunan manusia Kabupaten Tuban dapat dilihat dalam tabel berikut.

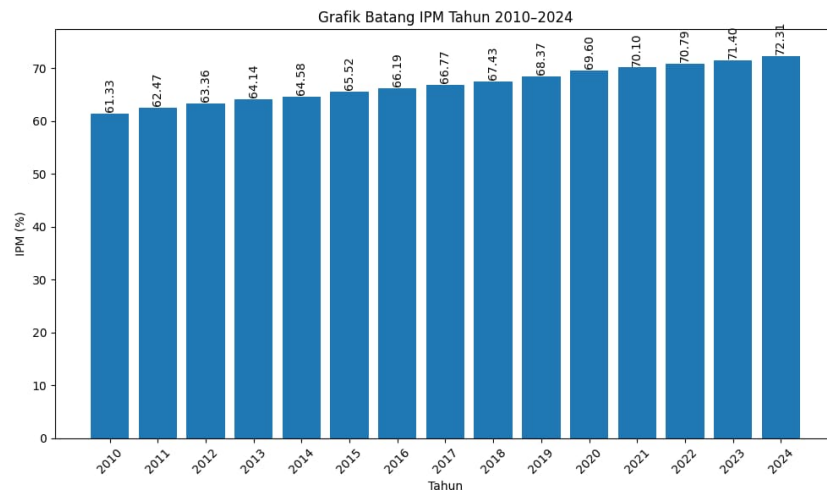
Tabel 1. 1 IPM Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur 2024

Nilai IPM 19 Terbesar		Nilai IPM 19 Terkecil	
Kabupaten/Kota	Nilai	Kabupaten/Kota	Nilai
Kota Surabaya	84,69	Kabupaten Banyuwangi	74,3
Kota Malang	84,68	Kabupaten Ngawi	73,91
Kota Madiun	84,51	Kabupaten Ponorogo	73,70
Kabupaten Sidoarjo	82,67	Kabupaten Malang	73,53
Kota Kediri	81,88	Kabupaten Blitar	73,44
Kota Mojokerto	81,76	Kabupaten Bojonegoro	72,75
Kota Blitar	81,44	Kabupaten Trenggalek	72,47
Kota Batu	79,69	Kabupaten Pasuruan	72,36
Kabupaten Gresik	78,93	Kabupaten Tuban	72,31
Kota Pasuruan	78,90	Kabupaten Pacitan	71,49
Kota Probolinggo	77,79	Kabupaten Bondowoso	71,22
Kabupaten Magetan	76,77	Kabupaten Situbondo	71,22
Kabupaten Mojokerto	76,69	Kabupaten Jember	70,93
Kabupaten Lamongan	75,90	Kabupaten Probolinggo	70,85
Kabupaten Jombang	75,67	Kabupaten Pamekasan	70,85
Kabupaten Nganjuk	75,24	Kabupaten Lumajang	70,31
Kabupaten Kediri	75,18	Kabupaten Sumenep	69,78
Kabupaten Tulungagung	75,13	Kabupaten Bangkalan	67,33
Kabupaten Madiun	74,81	Kabupaten Sampang	66,72

Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Pada tabel 1.1. diatas dapat dilihat bahwa nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Tuban masih tergolong rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar. Kabupaten dengan nilai indeks pembangunan manusia tertinggi berturut-turut di Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, Malang, Madiun dan Kabupaten Sidoarjo dengan nilai IPM masing-masing sebesar 84,69, 84,68, 84,51, dan 82,67 pada tahun 2024. Sedangkan, IPM Kabupaten Tuban berada pada urutan ke 28 dari 38 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur, dengan nilai sebesar 72,31. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan sejauh mana masyarakat dalam mengakses pendapatan, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai aspek pembangunan lainnya.

Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2010-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban tahun 2010–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 61,33 pada tahun 2010 menjadi 72,31 pada tahun 2024. Kenaikan yang relatif stabil setiap tahun ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek-aspek pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang secara umum menggambarkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban. Meskipun tidak terjadi lonjakan yang sangat tajam, tren positif ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Tuban mengalami kemajuan yang berkelanjutan, sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang berperan dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan data publikasi kesejahteraan rakyat Kabupaten Tuban, IPM menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut relatif bertahap dan belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan

kesejahteraan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban masih menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat mampu menikmati hasil pertumbuhan ekonomi secara merata. Permasalahan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor struktural yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Situasi tersebut juga sejalan dengan indikator kesejahteraan daerah yang masih menghadapi tantangan sosial-ekonomi. Berikut data jumlah penduduk miskin di kabupaten tuban selama tahun 2010-2024.

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tuban Tahun 2010-2024
(Ribuan Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan gambar 1.2 jumlah penduduk miskin Kabupaten Tuban tahun 2010–2024, terlihat bahwa perkembangan kemiskinan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin masih berada pada kisaran 225,8 ribu jiwa. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai sekitar 191 ribu jiwa pada tahun 2014. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada periode tersebut. Namun demikian, pada periode 2015–2017 jumlah penduduk miskin

cenderung stagnan bahkan sedikit meningkat, berada pada kisaran 196–199 ribu jiwa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan kemiskinan mulai melambat dan masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Pada tahun 2018 dan 2019 angka kemiskinan kembali mengalami penurunan hingga sekitar 170,8 ribu jiwa pada tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan signifikan masing-masing menjadi sekitar 187 ribu jiwa dan 192,5 ribu jiwa. Kenaikan ini berkaitan dengan dampak perlambatan ekonomi yang memengaruhi pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat. Memasuki tahun 2022 hingga 2024, jumlah penduduk miskin kembali menunjukkan tren penurunan hingga mencapai sekitar 168,8 ribu jiwa pada tahun 2024. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi, dalam jangka panjang jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban cenderung menurun dibandingkan kondisi awal periode. Dinamika tersebut menggambarkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang bersifat fluktuatif. Penurunan dan peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan belum sepenuhnya stabil dan masih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Gambar 1. 3 PDRB ADHK Perkapita Kabupaten Tuban Tahun 2010-2024 (Ribu Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan gambar 1.3 Tingkat Pendapatan (PDRB ADHK per kapita) Kabupaten Tuban tahun 2010–2024, terlihat bahwa secara umum terjadi tren peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Pada tahun 2010, PDRB ADHK per kapita tercatat sebesar 24.995,70 ribu rupiah, kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai 38.662,20 ribu rupiah pada tahun 2019. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah yang relatif stabil sebelum periode perlambatan ekonomi global. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 35.689,60 ribu rupiah. Penurunan tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap kinerja ekonomi daerah yang berdampak pada rata-rata pendapatan masyarakat. Pada tahun 2021 pendapatan per kapita mulai kembali meningkat menjadi 36.529,10 ribu rupiah dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 42.371,20 ribu rupiah pada tahun 2024. Kondisi ini menandakan adanya proses pemulihan dan penguatan ekonomi daerah dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, grafik tersebut menggambarkan bahwa kapasitas ekonomi Kabupaten Tuban cenderung mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami kontraksi pada periode tertentu. Tren kenaikan PDRB per kapita ini mengindikasikan adanya peningkatan nilai tambah produksi barang dan jasa yang dihasilkan daerah, yang secara agregat berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat.

Tingkat pendapatan daerah yang diprosikan melalui PDRB ADHK per kapita juga menjadi indikator penting dalam menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat. PDRB per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan yang diperoleh penduduk dalam suatu wilayah. Secara teoritis, peningkatan PDRB per kapita akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu diikuti oleh

peningkatan kualitas hidup apabila distribusi pendapatan tidak merata (Mulia & Saputra, 2020). Hal ini menunjukkan perlunya analisis empiris yang lebih mendalam. Dengan demikian, meskipun PDRB per kapita Kabupaten Tuban menunjukkan tren meningkat dalam jangka panjang, penting untuk mengkaji lebih lanjut apakah peningkatan tersebut benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Analisis ini menjadi relevan dalam melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tuban.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di berbagai daerah. Peningkatan pendapatan daerah berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat (Mulia & Saputra, 2020). Namun, hubungan tersebut tidak selalu konsisten antar wilayah karena dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi lokal. Penelitian lain menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah capaian pembangunan manusia suatu daerah (Sari *et. al*, 2026). Temuan ini menegaskan pentingnya pengentasan kemiskinan dalam strategi Pembangunan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada tingkat provinsi atau lintas wilayah.

Melihat beberapa indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban sebagaimana diuraikan di atas, maka menarik untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tuban”. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara pendapatan dan kemiskinan terhadap IPM, masih terdapat

keterbatasan dalam penelitian yang berfokus pada tingkat kabupaten secara spesifik. Banyak penelitian menggunakan data cross-section atau cakupan wilayah yang luas sehingga kurang menggambarkan dinamika lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk penelitian lanjutan yang lebih terfokus. Oleh karena itu, kajian pada Kabupaten Tuban menjadi relevan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini berupaya melengkapi keterbatasan tersebut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data time series Kabupaten Tuban. Dengan menguji pengaruh jumlah penduduk miskin dan tingkat pendapatan terhadap IPM, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris yang lebih akurat. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam literatur ekonomi pembangunan daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk miskin (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah tingkat pendapatan (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
3. Apakah jumlah penduduk miskin (X_1) dan tingkat pendapatan (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun secara selaras dengan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin (X_1) secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan (X_2) secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin (X_1) dan tingkat pendapatan (X_2) secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat yang diproksikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan model analisis kuantitatif yang menguji pengaruh jumlah penduduk miskin dan tingkat pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat bukti empiris mengenai hubungan antar variabel ekonomi makro daerah dalam konteks pembangunan wilayah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan cakupan wilayah atau periode yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi yang telah diterapkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia secara berkelanjutan.

1.5 Batasan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban, dengan periode observasi dari tahun 2010-2024. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban.
2. Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini dibatasi pada variabel ekonomi makro daerah yang meliputi jumlah penduduk miskin dan tingkat pendapatan (PDRB per kapita) sebagai variabel independen, serta kesejahteraan masyarakat yang diproksikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen.
3. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada hubungan langsung (pengaruh parsial dan simultan) antara variabel independen terhadap variabel dependen, tanpa memasukkan variabel intervening atau variabel moderasi lainnya yang secara teoritis juga dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
4. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R^2). Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan terhadap kesejahteraan masyarakat, serta untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi perubahan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tuban.